

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT PEMERINTAHAN KABUPATEN
MINAHASA UTARA**

*ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING BUDGET ABSORPTION IN THE CIVIL SERVICE AND
EDUCATION AND TRAINING AGENCY OF NORTH MINAHASA REGENCY GOVERNMENT*

Oleh:

Jingsi Virginia Ramopolii¹
Paulina Van Rate²
Joubert B. Maramis³

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[1ramopolijingsi@gmail.com](mailto:ramopolijingsi@gmail.com)

[2paulinavanrate@gmail.com](mailto:paulinavanrate@gmail.com)

[3joubertmaramis@unsrat.ac.id](mailto:joubertmaramis@unsrat.ac.id)

Abstrak: Di Indonesia lambatnya Penyerapan Anggaran menjadi masalah klasik yang terus terjadi setiap tahunnya, Hal ini berdampak pada lambatnya Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Pengambilan sampel menggunakan metode Purposive sampling. Sampel yang digunakan yaitu Kepala Badan, Pejabat perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan jabatan lainnya yang ada di Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 45 responden. Data dianalisis menggunakan Analisis Faktor Eksploratori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran belanja di Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yaitu ; (1) Faktor Pengadaan Barang dan Jasa yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 19,51% (2) Faktor Ganti Uang Persediaan yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 15,67% (3) Faktor Pencatatan Administrasi yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 12,69% (4) Faktor Dokumen Perencanaan yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 10,16% (5) Faktor Kompetensi SDM yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 8,38% . Kelima factor memiliki variansi sebesar 66,321% dalam mempengaruhi Penyerapan Anggaran.

Kata Kunci: Penyerapan anggaran, analisis faktor eksploratori

Abstract: In Indonesia, the slow absorption of budget becomes a classic problem that continues to occur every year. This has an impact on the slow realization of the implementation of government programs and activities. This study aims to analyze the factors that affect the absorption of the budget at the Government Personnel and Training Agency of North Minahasa Regency. Sampling using purposive sampling method. The sample used is the Head of the Agency, Planning and Finance Officer, Expenditure Treasurer, assistant treasurer and other positions in the Civil Service and Education and Training Agency of North Minahasa Regency as many as 45 respondents. Data were analyzed using exploratory factor analysis. The results of this study indicate that there are 5 (five) factors that influence the absorption of the budget in the Personnel and Education and Training Agency of North Minahasa Regency, namely; (1) The factor of procurement of goods and services that explains the variance of all items is 19.51% (2) The factor of reimbursement of supplies which explains the variance of all items is 15.67% (3) The factor of administrative records that explains the variance of all items is 12.69 % (4) The planning document factor that explains the variance of all items is 10.16% (5) The HR competency factor that explains the variance of all items is 8.38%. The five factors have a variance of 66.321% in influencing budget absorption.

Keywords: Budget absorption, exploratory factor analysis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, lambatnya Penyerapan Anggaran menjadi masalah klasik yang terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lambatnya Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah. Penyerapan Anggaran khususnya belanja barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Penyerapan Anggaran merupakan salah satu tolok ukur kinerja Pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran. Pelaksanaan Anggaran pada Pemerintah Daerah dimulai dengan ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh kepala SKPD sebagai pengguna Anggaran yang berisi sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan, Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana, serta pendapatan yang diperkirakan (Nordian dkk, 2012).

Penyerapan Anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan Anggaran yang maksimal tanpa adanya perencanaan Anggaran yang baik dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mustahil akan terwujud. Perencanaan Anggaran akan bermula dari pengajuan awal yang dilakukan kementerian dan lembaga yang kemudian bermuara dalam RKA-KL (Halim A., dan Kusufi, M. 2014: 104).

Untuk mewujudkan Penyerapan Anggaran belanja yang baik, perlu diperhatikan Realisasi Anggaran dengan target Anggaran yang telah ditetapkan. Apabila Realisasi Anggarannya masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi kendala dalam proses Penyerapan Anggaran. Perencanaan yang baik akan sangat membantu tingkat Penyerapan Anggaran, Selain itu diperlukan pengawasan sejak awal perencanaan agar dapat mendeteksi kemungkinan kegagalan Penyerapan Anggaran, untuk mempercepat Penyerapan Anggaran Belanja maka diperlukan peraturan yang berorientasi pada pemberian kepercayaan pada eksekutif agar dapat fleksibel dalam menggunakan anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Sinaga 2016).

Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Belanja Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, bahwa realisasi Anggaran Belanja dari tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Laporan Anggaran Belanja yang sudah direncanakan, tetapi tidak terealisasi sepenuhnya. Fenomena realisasi Anggaran setiap tahunnya menjadi masalah rutin. Realisasi Dana tidak efektif tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). SILPA menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah belum efektif, karena didalamnya masih ada program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan sedikit yang terlaksana pada tahun Anggaran yang bersangkutan. Tidak terealisasinya anggaran ini disebabkan oleh beberapa Factor diantaranya adalah Faktor pengadaan Barang/Jasa, Faktor ganti uang persediaan, Faktor pencatatan Administrasi, Faktor Dokumen Perencanaan, dan Faktor kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran. Berdasarkan permasalahan diatas serta beberapa faktor yang menyebabkan terealisasinya Anggaran, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara".

Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yaitu:

Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran

Menurut Abdul (2007:164) Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu tahun.

Menurut Indra (2010:191) Anggaran Merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Penyerapan Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009) Penyerapan Anggaran menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana Anggaran Pemerintah Daerah merupakan akumulasi dari Penyerapan Anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Menurut Halim (2014: 84), Penyerapan Anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari Anggaran). Oleh karena yang diamati adalah Organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan, maka Penyerapan anggaran disini dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi Anggaran sesuai yang tercantum dalam laporan realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

1. Pengadaan Barang/jasa

Berdasarkan kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis Dokumen pengadaan terdiri dari Dokumen pengadaan Barang/Jasa pemborongan/jasa lainnya dan Dokumen pengadaan jasa konsultansi. Dokumen pengadaan Barang/Jasa pemborongan/jasa lainnya terdiri dari Dokumen pemilihan penyedia dan Dokumen pasca/prakualifikasi, sedangkan Dokumen pengadaan jasa konsultansi terdiri dari Dokumen pemilihan penyedia dan Dokumen prakualifikasi.

Informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen (Herriyanto, 2012) diantaranya:

1. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan
2. Jenis kontrak
3. Sumber dana
4. Metoda pengadaan
5. Nilai kontrak
6. Standar-standar Nasional Indonesia

2. Ganti Uang Persediaan

Menurut Amir (2013) menjelaskan Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang diberikan kepada Bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. UP hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran yang tidak mungkin dilaksanakan dengan pembayaran secara langsung atau dapat diartikan kegiatan yang sifatnya insidental/mendesak.

3. Pencatatan Administrasi

Administrasi dalam arti sempit, menurut Handyaningrat (1988:2) mengatakan "Administrasi secara sempit berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan", definisi tersebut dapat disimpulkan Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi dalam arti luas. Menurut Gie (1980) mengatakan "Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu".

4. Dokumen Perencanaan

Dalam menjalankan roda pemerintahan peran Pemerintah sebagai pengelola Keuangan negara sangatlah penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan Pemerintah dalam mengelola Keuangan tersebut tercermin dalam APBD yang dimana APBD diharapkan dapat digunakan dan dikelola secara tepat waktu dan tepat sasaran sehingga realisasi Anggaran pun dapat terserap secara optimal. Anggaran sebagai salah satu sumber dana yang digunakan dalam kegiatan membangun guna kepentingan masyarakat pada penyusunannya harus memperitungkan kemungkinan rencana belanja dana yang baiknya digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan fungsi Anggaran sebagai alat perencanaan. Perencanaan Anggaran tersusun dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka Anggaran yang disebut dengan rencana kerja. Setiap rencana kerja menjadi landasan dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil kinerja pembangunan.

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Gomes (1995) Menyebutkan bahwa semua potensi Sumber Daya Manusia tersebut berpengaruh terhadap pencapaian tujuannya. Bagi Pemerintah tujuan yang dicapai adalah kesejahteraan masyarakat yaitu pencapaiannya dilakukan melalui serapan Anggaran belanja terhadap program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Hendris Heriyanto (2012) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja di Kementerian Lembaga di Wilayah Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja di Wilayah Jakarta disebabkan oleh: faktor Perencanaan, faktor Administrasi, faktor SDM, faktor Dokumen Pengadaan.

Penelitian Carlin T Putri (2014) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu”. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji Pengaruh Dokumen Perencanaan, Pencatatan Administrasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dokumen Pengadaan dan Uang persediaan terhadap Penyerapan Anggaran pada SKPD Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Sampel penelitian adalah 44 responden yang menduduki jabatan dibidang yang berkaitan dengan Anggaran diantaranya adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penandatanganan Surat perintah membayar dan Bendahara pengeluaran pada 11 SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian dengan regresi linear berganda menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Anggaran, Dokumen Pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dan Uang Persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Dokumen Perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan Anggaran dan Pencatatan Administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.

Penelitian Aulia Rahim dan Harsya Saputra (2018) yang berjudul “Eksploratory Factor Analysis (EFA) pada Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasikan Factor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan APBN di Sumatera Barat pada tahun 2017. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Factor Eksploratori yang digunakan untuk mengidentifikasi Variabel Laten yang digunakan untuk melakukan tes statistic terhadap Kuesioner yang terlibat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 6 (enam) faktor yang berpengaruh terhadap Penyerapan APBN di Provinsi Sumatera Barat yaitu Faktor pengadaan barang dan jasa, Faktor perubahan kebijakan internal satuan kerja, Faktor administrasi perencanaan Anggaran, Faktor pejabat perbendaharaan, Faktor perubahan kebijakan Pemerintah dan Faktor proses verifikasi Dokumen untuk pelaksanaan Anggaran, Studi ini salah satunya merekomendasikan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat Penyerapan Anggaran.

Penelitian Santoso, Tri Kurniasih, Ahmad Soleh (2019) yang berjudul “Dampak Penyerapan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus di Provinsi Jambi)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan Penyerapan Anggaran, menganalisis Faktor- faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran belanja pada SKPD pada Pemerintah Provinsi Jambi, menganalisis pengaruh Penyerapan Belanja SKPD pada Instansi dan mencari strategi kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kinerja Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari total belanja Pemerintahan Provinsi Jambi cenderung mengalami keterlambatan Penyerapan Anggaran dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran, sedangkan Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Analisis Eksploratori Factor Analysis (EFA). Widarjono (2015) mendefinisikan Analisis Factor adalah Teknik yang mencari Factor yang mampu menjelaskan hubungan berbagai Indicator Independent yang diobservasi. Melalui analisis Factor ini dapat diketahui Factor apa saja yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas Objek/Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh Peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Menurut Widiyanto (2010:5) Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang akan di generalisasikan dari hasil penelitian. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh Staff Pegawai yang ada di Badan Kepegawaian Dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang berjumlah 60 Orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dimana purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data pertimbangan tertentu (sugiyono 2016:85). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 Responden.

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada Responden untuk menjawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah variabel-variabel yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran, setiap pertanyaan telah disertai sejumlah pilihan jawaban yang kemudian Responden hanya memilih yang paling sesuai. Variabel yang dilakukan digambarkan dalam bentuk indikator variabel, selanjutnya indikator tersebut dapat menjadi dasar penyusunan item-item pertanyaan.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan proses penyusunan yang dilakukan untuk mengolah Data menjadi informasi agar mudah di mengerti, di gunakan serta dapat bermanfaat untuk solusi permasalahan. Teknik Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode atau Teknik Eksploratori Factor Analysis dimana sejumlah indicator dicari untuk membentuk Factor. Menurut Suprato (2004) adalah merumuskan dan melakukan identifikasi variabel-variabel yang akan digunakan dalam Analisis Factor. Melalui analisis ini dapat diketahui Factor apa saja yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran.

Analisis Faktor

Analisis Faktor ini di gunakan untuk merumuskan masalah dan melakukan identifikasi variabel-variabel yang akan di gunakan dalam analisis faktor. Kemudian menjelaskan bahwa langkah berikutnya adalah membentuk matriks korelasi antar variabel yang digunakan, selanjutnya adalah membentuk matriks korelasi antar variabel yang di gunakan, selanjutnya ditentukan banyaknya faktor yang akan dipilih (Extracted) dengan menggunakan metode rotasi. Langkah terakhir adalah menginterpretasikan factor hasil rotasi. Sebelum melakukan Analisis factor, perlu juga dilakukan uji validitas dan uji korelasi terhadap terhadap Data Primer yang di gunakan, dari Analisis Faktor akan di dapatkan Faktor-faktor baru yang terbentuk dari variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap permasalahan Penyerapan Anggaran. Secara umum langkah-langkah yang di gunakan dalam Analisis Faktor adalah sebagai berikut:

1. Uji Matriks Korelasi Antar Variabel
2. Ekstraksi Faktor
3. Pendistribusian Variabel Kedalam Faktor
4. Penanaman dan Pembahasan Faktor

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Faktor

Tabel 1. KMO dan Bartlett`s Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.468
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	221.994
	Df	105
	Sig.	.000

Sumber: Data Diolah 2021 (SPSS 23)

Berdasarkan pada tabel 1, Langkah awal untuk menguji kelayakan analisis factor adalah dengan melihat Matrik Korelasi secara keseluruhan melalui uji Bartlett Test of Sphericity dan Kaiser Meyer Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy (MSA). Variabel yang akan di uji sebanyak 15 item dihasilkan nilai KMO Measure of Sampling Adequacy (MSA) Sebesar 0,468 dan nilai chi-square sebesar 221.994 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 105 dengan tingkat signifikansi 0.000.

Tabel 2. Anti Image Matrics

		Anti-image Matrices														
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
Anti-image Correlation	X1	.439 ^a	-.129	.103	-.497	-.280	-.194	.199	.170	.162	-.373	-.362	.092	.187	.532	.194
	X2	-.129	.553 ^a	-.252	-.039	-.329	.359	-.118	-.152	-.032	-.173	-.255	-.413	.104	.036	.226
	X3	.103	-.252	.610 ^a	-.274	.035	-.041	-.250	.120	-.093	-.071	-.124	.003	-.380	.113	-.211
	X4	-.497	-.039	-.274	.360 ^a	.217	.174	-.041	-.284	-.168	.234	.392	.386	.051	-.615	-.197
	X5	-.280	-.329	.035	.217	.205 ^a	-.136	.058	-.010	-.289	.223	.557	.023	-.141	-.419	.160
	X6	-.194	.359	-.041	.174	-.136	.528 ^a	-.027	.027	.085	-.451	-.156	-.023	-.287	-.057	-.148
	X7	.199	-.118	-.250	-.041	.058	-.027	.497 ^a	.298	.079	-.112	.038	-.056	.107	.025	.107
	X8	.170	-.152	.120	-.284	-.010	.027	.298	.443 ^a	-.023	-.307	-.142	-.005	-.292	.198	-.222
	X9	.162	-.032	-.093	-.168	-.289	.085	.079	-.023	.662 ^a	.075	-.543	-.167	-.090	.219	-.128
	X10	-.373	-.173	-.071	.234	.223	-.451	-.112	-.307	.075	.520 ^a	.193	.050	.199	-.244	.124
	X11	-.362	-.255	-.124	.392	.557	-.156	.038	-.142	-.543	.193	.354 ^a	.134	-.080	-.582	.183
	X12	.092	-.413	.003	.386	.023	-.023	-.056	-.005	-.167	.050	.134	.617 ^a	-.024	-.093	-.261
	X13	.187	.104	-.380	.051	-.141	-.287	.107	-.292	-.090	.199	-.080	-.024	.548 ^a	.185	.269
	X14	.532	.036	.113	-.615	-.419	-.057	.025	.198	.219	-.244	-.582	-.093	.185	.294 ^a	-.126
	X15	.194	.226	-.211	-.197	.160	-.148	.107	-.222	-.128	.124	.183	-.261	.269	-.126	.584 ^a

Sumber: Data Diolah 2021 (SPSS 23)

Berdasarkan Tabel 2, anti image Matrics correlation (bagian bawah tabel anti image matrics) terdapat sejumlah angka yang berbentuk diagonal yang bertanda "a" Tanda "a" ini menunjukkan Measure of sampling adequacy (MSA) sebuah variabel.

Tabel 3. Ekstraksi Faktor

		Total Variance Explained							
		Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings	
Component	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
2	2.351	15.673	35.176	2.351	15.673	35.176	2.338	15.584	32.606
3	1.904	12.694	47.870	1.904	12.694	47.870	1.972	13.144	45.750
4	1.510	10.068	57.938	1.510	10.068	57.938	1.547	10.312	56.062
5	1.257	8.383	66.321	1.257	8.383	66.321	1.539	10.259	66.321
6	.998	6.652	72.973						
7	.983	6.556	79.529						
8	.864	5.760	85.289						
9	.570	3.800	89.089						
10	.446	2.972	92.061						
11	.336	2.240	94.301						
12	.286	1.905	96.205						
13	.238	1.587	97.792						
14	.221	1.474	99.267						
15	.110	.733	100.000						

Sumber: Data Diolah 2021 (SPSS 23)

Berdasarkan tabel 3, penentuan jumlah factor dalam penelitian ini didasarkan pada nilai eigenvalue dengan kriteria nilai eigenvalue lebih besar dari 1 dianggap valid dari jumlah factor yang terbentuk. Pada Tabel 3 Menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor yang mempunyai nilai eigenvalue > 1 dengan presentase varian sebesar 66,321 %.

Tabel 4. Component Matriks

	Component Matrix ^a				
	Component				
	1	2	3	4	5
X9	.784	.189	.162	-.027	-.078
X3	.627	.081	.197	.072	.324
X12	.571	.168	-.445	-.026	.055
X10	-.495	.477	.332	.201	.263
X1	-.495	.494	.366	.350	-.164
X11	.493	.401	.412	.109	.263
X15	.257	-.673	.220	-.263	.119
X6	-.374	.479	.293	-.248	.337
X14	.278	-.463	.399	.404	.122
X4	.029	-.550	.612	.324	-.129
X8	.266	.142	.576	-.330	-.253
X2	.536	.424	-.066	.538	-.145
X13	.437	.453	.039	-.499	-.027
X7	.081	-.066	-.411	.401	.618
X5	.139	.197	-.228	.350	-.592

Sumber: Data Diolah 2021 (SPSS 23)

Tabel 5. Rotated Component Matrix

	Rotated Component Matrix ^a				
	Component				
	1	2	3	4	5
X11	.770	.230	.058	.076	-.020
X9	.722	-.272	-.008	.221	.198
X3	.708	-.136	.117	-.084	-.089
X10	-.012	.821	-.024	-.072	-.114
X1	-.126	.815	.073	.135	.261
X6	.063	.617	-.279	.108	-.395
X15	.034	-.518	.417	.140	-.433
X12	.406	-.408	-.358	-.217	.224
X4	-.020	-.015	.871	.197	-.033
X14	.240	-.125	.739	-.097	-.028
X13	.486	-.101	-.504	.376	-.076
X7	.157	-.039	.001	-.831	-.077
X8	.329	.049	.089	.686	-.086
X5	-.051	-.056	-.054	.084	.753
X2	.568	.067	.001	-.160	.655

Sumber: Data Diolah 2021 (SPSS 23)

Variabel-Variabel yang di ekstraksi akan dilakukan proses rotasi. Proses rotasi ini dilakukan pada variabel yang lolos dalam uji MSA. Component matrix dapat menentukan kontribusi variabel terhadap factor yang terbentuk dapat dilihat pada Tabel 4. Distribusi variabel terlihat pada Tabel 4, component matrix. Berdasarkan Tabel Variance Explained dari 15 variabel yang diteliti terdapat 5 faktor yang terbentuk yang mewakili variabel-variabel tersebut. Pada penelitian ini rotasi dilakukan dengan menggunakan metode varimax. Pada Tabel 5 Rotated Component Matrix menunjukkan bahwa tiap-tiap variabel berada pada masing-masing kelompok factor.

Tabel 6. Penanaman factor yang terbentuk

Nama Faktor	Eigen Value/Total Variance	X	Item Pertanyaan	Factor Loading
Faktor 1: Pengadaan Barang dan jasa	2.925/ 19.503	X11	HPS tidak ditentukan berdasarkan keahlian dan tidak melakukan survei pasar	0,770
		X9	Berkas pengadaan kontrak dan lelang tidak lengkap saat pengajuan LS	0,722
		X3	Berkas SPJ tidak lengkap saat pengajuan GU/TU	0,708
Faktor 2 : Ganti uang persediaan	2.351/ 15.673	X10	Adanya sisa UP/TUP yang harus disetorkan ke kas negara	0,821
		X1	Adanya pengajuan uang persediaan UP sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar	0,815
		X6	Pengajuan UP harus sesuai jadwal	0,617
Faktor 3 : Pencatatan administrasi	1.904/ 12.694	X4	Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek sehingga kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung	0,871
		X14	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran	0,739
Faktor 4 : Dokumen perencanaan	1.510/ 10.068	X7	DIPA perlu di revisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan	0,831
		X8	Revisi DIPA perlu persetujuan pejabat berwenang	0,686
Faktor 5 : Kompetensi Sumber daya manusia	1.257/ 8.383	X5	Panitia pelaksana pengadaan barang dan jasa harus kompeten	0,753
		X2	Pejabat/pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat	0,655

Sumber: Data Diolah 2021

Nilai Loading mengidentifikasi korelasi antar variabel dengan faktor yang terbentuk. Semakin tinggi nilai loading berarti semakin erat hubungan variabel terhadap faktor. Pada Tabel 6, kelompok factor hasil rotasi menunjukkan semua variabel membentuk suatu factor berdasarkan nilai loading terbesarnya. Sehingga factor diinterpretasikan pada Tabel 6. Untuk memberikan nama pada faktor yang terbentuk dari hasil rotasi matriks, kelima faktor diberikan nama sesuai dengan karakteristik item-item pertanyaan atau variabel yang membentuknya. Penulis, memberikan nama kelima faktor tersebut dengan nama yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Pembahasan

1. Faktor pengadaan Barang Dan Jasa

Faktor pengadaan Barang dan Jasa memiliki nilai eigen value 2,925 dan variansi sebesar 19,503%. Variabel pembentuk factor pengadaan barang dan jasa adalah: 1) Berkas pengadaan kontrak dan lelang tidak lengkap saat pengajuan LS; 2) HPS tidak ditentukan berdasarkan keahlian dan tidak melakukan survei pasar. 3) Berkas SPJ tidak lengkap saat pengajuan GU/TU. Variabel dominan pada factor pengadaan barang dan jasa adalah HPS tidak ditentukan berdasarkan keahlian dan tidak melakukan survei pasar. dengan nilai loading factor sebesar 0,770 pada tabel rotated component matrix. HPS Diperlukan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran barang dan jasa untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan kontrak. Teknik penyusunan HPS dibuat berdasarkan survei pasar, data kontrak tahun sebelumnya atau menggunakan referensi lain seperti harga

satuan/standar biaya yang diterbitkan oleh pemerintah. Sehingga untuk Menyusun HPS yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa maka diperlukan Pendidikan dan pelatihan yang insentif untuk pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS) ini yang dilakukan bagi PPK serta diwajibkannya PPK untuk memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Nanik T Hasni (2016) mengatakan bahwa factor Pengadaan Barang/Jasa merupakan factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran. Sama halnya dengan Ramdhani dan Setiawan (2019) mengatakan bahwa factor Pengadaan Barang/Jasa merupakan factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran.

2. Faktor Ganti Uang Persediaan

Faktor Ganti Uang Persediaan memiliki nilai eigen value 2,351 dan variansi sebesar 15,673%. Variabel pembentuk factor ganti uang persediaan adalah; 1) Adanya pengajuan uang persediaan UP sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar; 2) Adanya sisa UP/TUP yang harus disetorkan ke kas negara; 3) Pengajuan UP harus sesuai jadwal. Variabel dominan pada factor ganti uang persediaan adalah Adanya sisa UP/TUP yang harus disetorkan ke kas negara dengan nilai loading factor sebesar 0,821 pada tabel rotated component matrix. Bendahara pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP ke kas negara yang berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun dalam rekening bank. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetorkan ke kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Carlin T Putri (2014) mengatakan bahwa factor Ganti Uang Persediaan merupakan factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran.

3. Faktor Pencatatan Administrasi

Faktor Pencatatan Administrasi memiliki nilai eigen value 1,904 dan variansi sebesar 12,694%. Variabel pembentuk factor pencatatan administrasi adalah; 1) Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek sehingga kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung; 2) Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran. Variabel dominan pada factor pencatatan administrasi adalah Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek sehingga kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung dengan nilai loading factor sebesar 0,871 pada tabel rotated component matrix. Pada kenyataannya setiap awal tahun setiap satuan kerja termasuk BKD diharuskan Menyusun RKAKL untuk kebutuhan beberapa tahun kedepan. Kegiatan tersebut biasanya dikoordinasikan oleh beberapa kantor. seharusnya pada setiap penyusunan RKAKL setiap kantor sudah menyiapkan data-data pendukung yang diperlukan sebelumnya seperti rencana kegiatan serta output yang ingin dihasilkan untuk beberapa tahun kedepan. namun biasanya yang sering terjadi karena lemahnya koordinasi antar bagian maka cenderung hasil penyusunan RKAKL kurang maksimal sehingga rencana yang sudah dituangkan nanti akan sedikit berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan, sehingga pada akhirnya DIPA yang sudah terbit nanti harus dilakukan penyesuaian lagi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Rahim dan Harsya Saputra (2018) juga mengatakan bahwa factor pencatatan Administrasi merupakan factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran.

4. Faktor Dokumen Perencanaan

Faktor Dokumen Perencanaan memiliki nilai eigen value 1,510 dan variansi sebesar 10,068%. Variabel pembentuk factor dokumen perencanaan; 1) DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan .2) Revisi DIPA perlu persetujuan pejabat berwenang. Variabel dominan pada factor dokumen perencanaan adalah DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan. dengan nilai loading factor sebesar 0,831 pada tabel rotated component matrix. Proses revisi Anggaran dapat menyebabkan terlambatnya penyerapan anggaran karena anggaran baru bisa digunakan lagi setelah ada persetujuan revisi anggaran. Sepanjang tidak ada perubahan dalam DIPA maka revisi anggaran cukup menjadi kewenangan pengguna anggaran, namun jika revisi anggaran sampai mengubah dokumen DIPA maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Oktaliza Y Ahyaruddin, M. Putri (2020) mengatakan bahwa factor perencanaan Anggaran merupakan factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran. Sama halnya dengan Putri dkk (2017) yang mengatakan bahwa factor perencanaan Anggaran merupakan factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran. Penelitian James Sinaga (2016) mengatakan bahwa factor dokumen perencanaan Anggaran merupakan factor yang sangat membantu dalam tingkat Penyerapan Anggaran.

5. Faktor Kompetensi SDM

Faktor Kompetensi SDM memiliki nilai eigen value 1,257 dan variansi sebesar 8,383%. Variabel pembentuk factor kompetensi SDM; 1) Pejabat/pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat; 2) Panitia pelaksana pengadaan barang dan jasa harus kompeten. Variabel dominan pada factor kompetensi SDM adalah Panitia pelaksana pengadaan barang dan jasa harus kompeten dengan nilai loading factor sebesar 0,753 pada tabel rotated component matrix. Panitia pelaksana pengadaan barang dan jasa harus memiliki kompetensi dan bersertifikasi. Dengan Demikian baik kelompok kerja, pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun satuan kerja (Satker) harus memiliki sertifikasi yang artinya harus benar-benar kompeten menguasai proses perencanaannya, pelaksanaannya sampai dengan evaluasi dan bisa mengatasi dampak-dampak yang terjadi. Dimana semua SDM yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa harus memiliki kompetensi dan bersertifikasi agar bisa melaksanakan secara efektif, efisien dan transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Siti Salamah (2018) mengatakan bahwa factor kompetensi SDM merupakan factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran. Sama halnya dengan penelitian Ramdhani dan Zaenur Anisa (2017) mengatakan bahwa factor kompetensi SDM merupakan factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran. Penelitian Sudasri (2016) mengatakan bahwa factor kompetensi SDM merupakan factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan di analisis dengan menggunakan Eksploratory Faktor Analysis maka dapat disimpulkan bahwa factor factor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara secara umum hampir sama dengan yang ditemukan oleh peneliti -peneliti sebelumnya. Hasil analisis diatas disebabkan oleh 5 (lima) faktor dengan memiliki variansi sebesar 66,321%. Adapun urutan Factor dari kelima Factor tersebut berdasarkan Total Variance-nya yaitu:

1. Faktor pengadaan Barang dan Jasa yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 19,503%.
2. Faktor ganti uang persediaan yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 15,673%
3. Faktor pencatatan Administrasi yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 12,694%
4. Faktor dokumen perencanaan yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 10,068%
5. Faktor kompetensi SDM yang menjelaskan variansi seluruh item sebesar 8,383% .

Saran

Saran yang di sampaikan melalui penelitian ini yaitu:

1. Mengadakan sosialisasi bersama tentang peraturan terkait mekanisme penatausahaan APBD dan mengadakan pelatihan yang insentif dan Diklat bagi SDM yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Barang/Jasa.
2. Pengajuan TUP Sebanyak 2 kali dalam waktu 1 bulan, TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Apabila TUP tidak habis digunakan maka diwajibkan harus menyetorkan ke kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja.
3. Pada saat akan melakukan penyusunan RKAKL harus lebih diperhatikan dan dibuat dengan semaksimal mungkin. Lebih berkoordinasi dengan semua bagian agar rencana kerja tiap-tiap bagian terkoordinasi dalam RKAKL. Hal ini sangat penting karena Anggaran atau DIPA bila sudah disahkan maka akan segera dapat dijalankan dengan baik karena sudah disusun dengan baik.
4. Revisi Anggaran harus lebih ditekan seminimal mungkin karena akan mengganggu konsentrasi dan memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu adanya konsistensi dalam menjalankan Anggaran yang tercantum dalam DIPA.
5. Memberikan reward untuk mendorong motivasi para pejabat pengadaan barang dan jasa agar lebih giat dan kompeten dalam menjalankan/ melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, M. (2013). *Penatausahaan Keuangan Daerah, Edisi Ke-3*. Jakarta: Rineka Cipta.

- A, Santoso, Trikurniasih dan A. Soleh (2019). Dampak Penyerapan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus di Provinsi Jambi). *Journal Economics and Business*. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/77> . Diakses pada 10 April 2021.
- Bastian, indra. (2010). *Akuntansi Sektor publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Carlin, T. Putri. (2014). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/8077> . Diakses pada 08 April 2021.
- Gie, The Liang. (1980) “*Dasar-Dasar Administrasi, suatu kumpulan karangan Di Daerah*” Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gomes, Faustino Cardoso. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Halim, H. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., dan Kusufi, M. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handyaningrat, Soewarno. (1988). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Heriyanto, H. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja di Kementerian Lembaga di Wilayah Jakarta. *Thesis FE-UI*, Jakarta. <https://jke.feb.ui.ac.id/index.php/JKE/article/view/43> . Diakses pada 08 April 2021.
- Sinaga, J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechts Vinding media pembinaan hukum nasional* Vol. 5 No. 2 Agustus 2016. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/144>. Diakses pada 08 April 2021.
- Nanik, T. Hasni. (2016). Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. *Telaah Manajemen* Vol.13 Edisi 1 April 2016 Hal. 33-44, <https://www.unisbank.ac.id/> . Diakses pada 08 April 2021.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti. A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktaliza Y, Ahyaruddin, dan M., Putri (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Jurnal Accounting and Business* Vol.1 No.2. <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/MRABJ/article/view/1918>. Diakses pada 08 April 2021.
- Putri, Yuniarta, dan Prayudi (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran (Studi kasus pada SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *Jurnal Akuntansi* Vol.8 No.2 Tahun 2017. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13679> . Diakses pada 08 April 2021.
- Rahim, A., dan Saputra, H. (2018) . Eksploratory Factor Analysis (EFA) Pada Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan kebijakan publik* Vol 3 No.3 Hal 236-254. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/72> . Diakses pada 22 April 2021.
- Ramadhani, R. dan Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol.1 No.2 2019 Hal 710-726. <http://jea.pjpp.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/104> . Diakses pada 08 April 2021.
- Ramdhani, dan Zaenur Anisa (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Siti Salamah (2018). Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Journal Economics Development*.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/21927> . Diakses pada 10 April 2021.

Sudasri (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran (Studi kasus pada SKPD kota padang). *Skripsi Thesis, Universitas Negeri Padang*.
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/2378/1887>. Diakses pada 08 April 2021.

Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supranto, J. (2004). *Analisis Mulltivariate Arti dan Interpretasi*. Rineka Cipta, Jakarta.

Widiyanto, Joko. (2010). *SPSS for windows untuk Analisis Data Statistik dan Penelitian*. Surakarta: BP-FKIP UMS.

Widarjono. A. (2015). *Analisis Multivariate Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS*. UPP STIM YKPN: Jogjakarta.

